

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN ULUAN TAHUN 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
KECAMATAN ULUAN**



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III
SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah adalah:
Bab I Pendahuluan;
Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Bab V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Kecamatan:

- a. Kecamatan Tampahan;
- b. Kecamatan Balige;
- c. Kecamatan Laguboti;
- d. Kecamatan Sigumpar;
- e. Kecamatan Silaen;
- f. Kecamatan Siantar Narumonda;
- g. Kecamatan Porsea;
- h. Kecamatan Uluan;
- i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- j. Kecamatan Parmaksian;
- k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- l. Kecamatan Lumban Julu;
- m. Kecamatan Ajibata;
- n. Kecamatan Habinsaran;
- o. Kecamatan Borbor;
- p. Kecamatan Nassau;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
MERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
o. Kepala Bagian Hukum



PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Tahun 2026.

RENJA Kecamatan Uluan merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Kecamatan Uluan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Tahun 2026, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Uluan, 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ULUAN TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Uluan	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan	12
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Uluan	18
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	19
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN ULUAN	26
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Uluan	27
3.3. Program dan Kegiatan	28
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
4.1 Program dan Kegiatan	37
4.2 Pendanaan Indikatif	38
BAB V. PENUTUP	39

DAFTAR LAMPIRAN

TABEL T.C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Uluan s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan) Kabupaten Toba Samosir
TABEL T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba TABEL
TABEL T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Toba
TABEL T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Toba
TABEL T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Uluan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Toba

BAB I

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur pada pasal 25 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 226 Camat mendapatkan pelimpahan tugas sebagai kewenangan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas pemerintahan umum dan kewenangan dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas lainnya yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Perda.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Sarana pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan.
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan atau kelurahan;.
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan,; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Uluan Tahun 2026 merupakan rencana tahun keempat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Uluan 2021 – 2026, dan merupakan kelanjutan RENJA Kecamatan Uluan Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Uluan Tahun 2026 berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2026, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kantor Camat Uluan untuk pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026.

Secara umum Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Uluan Tahun 2026 memuat kebijakan dan kegiatan yang merupakan penjabaran dan implementasi serta pemberdayaan aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan dari Bupati Toba. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2026. Termasuk isu-isu strategis yang ikut mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2026 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba (RPJMD) Tahun 2025- 2030.

RENJA Kecamatan Uluan mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Kecamatan Uluan yang memuat kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Toba karena memuat Program dan Kegiatan Kantor Camat Uluan selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Kecamatan Uluan sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana APBD Kabupaten Toba.

Kedudukan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Uluan merupakan bagian penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RENSTRA) Kecamatan Uluan Tahun 2025-2030 dan Dokumen Renja Kantor Camat Uluan Tahun 2026 ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang antara lain berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing- masing Program yang didasarkan atas pagu indikatif.

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian, dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan Kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

Adapun acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Uluan adalah mengacu pada RPJPD Kabupaten Toba yang maksudnya untuk menjamin terciptanya kesinergian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan. Selanjutnya bahwa Rencana Kerja ini disusun mempedomani TUPOKSI sehingga dalam pelaksanaan RENJA ini benar-benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai Aparatur Daerah/Kabupaten. Walaupun dalam pelaksanaannya bahwa ada beberapa program yang disusun berdasarkan isu-isu yang strategis yang perlu mendapat penanganan mendesak dan secepatnya dan juga program yang disusun berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan.

Oleh sebab itu bahwa Kecamatan Uluan tidak terlepas dan bahkan merupakan tindak lanjut penjabaran dari Visi Misi Kabupaten Toba dalam bentuk program dan kegiatan; yang sudah barang tentu menjadi acuan Kantor Camat Uluan sebagai Perangkat Daerah di Kecamatan untuk menjabarkan atau menindaklanjuti Visi- Misi tersebut.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II

- Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026);
 - 9 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2021-2026);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- 13 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
- 14 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 71 Tahun 2021 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Toba dan Iku Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Uluan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas perencanaan kegiatan strategis di Kecamatan Uluan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan oleh Pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka RENJA Kecamatan Uluan ini disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Uluan untuk mewujudkan dan mendukung Visi-Misi Kabupaten Toba yang dijabarkan dalam 1 (satu) tahun Anggaran
2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Uluan dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD

Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam 1 (satu) tahun.

3. RENJA Kecamatan Uluan ini bertujuan sebagai penyelaras, Panduan, Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Kecamatan Uluan yang selanjutnya dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan untuk tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penyusunan RENJA Kecamatan Uluan Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Gambaran Umum penyusunan RENJA Kecamatan Uluan yang memuat Substansinya pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Renja ini dibuat.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Telaah terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dan Sasaran dari Renja Kecamatan Uluan dan memuat Program dan Kegiatan yang memuat Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana untuk Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

TABEL 2.1 (TC. 29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KECAMATAN ULUAN S/D TAHUN 2024 KABUPATEN TOBA

OPD : KANTOR CAMAT ULUAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024				
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)		
1				2	3	4	5		6		7		8		9= (8/7)		10 = (6+8)		11=(10/5)*100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	100.00	775,000,000.00	100.00	55,465,517.00	100.00	113,178,605.00	100.00	40,610,415.00	82.85%	35.88%	40.00	96,075,932.00	40.00%	12.40%
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan pemerintahan di kecamatan	Kegiatan	25.00	585,000,000.00	100.00	34,257,523.00	5.00	113,178,605.00	100.00	40,610,415.00	2000.00%	35.88%	200.00	74,867,938.00	800.00%	12.80%
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	100.00	190,000,000.00	100.00	21,207,994.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00%	0.00%	40.00	21,207,994.00	40.00%	11.16%
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	%	100.00	289,000,000.00	50.00	23,167,898.00	100.00	20,784,040.00	50.00	3,500,000.00	50.00%	16.84%	20.00	26,667,898.00	20.00%	9.23%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan	Kegiatan	30.00	289,000,000.00	2.00	23,167,898.00	2.00	20,784,040.00	2.00	3,500,000.00	100.00%	16.84%	4.00	26,667,898.00	13.33%	9.23%
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	%	100.00	114,900,000.00	100.00	19,200,000.00	100.00	17,800,000.00	100.00	8,700,000.00	100.00%	48.88%	40.00	27,900,000.00	40.00%	24.28%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	5.00	114,900,000.00	1.00	19,200,000.00	1.00	17,800,000.00	1.00	8,700,000.00	100.00%	48.88%	2.00	27,900,000.00	40.00%	24.28%
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	%	100.00	179,000,000.00	100.00	23,625,000.00	100.00	25,275,000.00	50.00	13,200,000.00	50.00%	52.23%	30.00	36,825,000.00	30.00%	20.57%
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan difasilitasi	Desa	60.00	179,000,000.00	17.00	23,625,000.00	17.00	25,275,000.00	17.00	13,200,000.00	100.00%	52.23%	34.00	36,825,000.00	56.67%	20.57%
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	%	100.00	12,620,108,774.00	64.20	1,770,726,256.00	100.00	1,766,700,360.00	64.11	2,143,330,989.00	64.11%	121.32%	25.66	3,914,057,245.00	25.66%	31.01%

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
1				2	3	4	5		6		7		8		9= (8/7)		10 = (6+8)		11=(10/5)*100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100.00	26,000,000.00	33.33	908,169.00	100.00	1,373,780.00	100.00	2,100,000.00	100.00%	152.86%	26.67	3,008,169.00	26.67%	11.57%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Cakupan layanan administrasi keuangan"	%	100.00	10,114,101,112.00	50.00	1,505,345,469.00	100.00	1,491,994,382.00	100.00	1,982,531,326.00	100.00%	132.88%	30.00	3,487,876,795.00	30.00%	34.49%
7	01	01	2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Kepegawian	%	100.00	61,500,000.00	69.23	5,940,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!	13.85	5,940,000.00	13.85%	9.66%
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Cakupan layanan administrasi umum"	%	100.00	1,051,787,662.00	85.71	84,742,059.00	100.00	129,621,628.00	100.00	64,308,853.00	100.00%	49.61%	37.14	149,050,912.00	37.14%	14.17%
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	100.00	542,500,000.00	87.50	38,542,445.00	100.00	19,599,270.00	25.00	14,874,000.00	25.00%	75.89%	22.50	53,416,445.00	22.50%	9.85%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur	%	100.00	435,220,000.00	45.83	77,430,000.00	100.00	75,720,000.00	66.67	41,460,000.00	66.67%	54.75%	22.50	118,890,000.00	22.50%	27.32%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	%	100.00	389,000,000.00	77.78	57,818,114.00	100.00	48,391,300.00	57.08	38,056,810.00	57.08%	78.64%	26.97	95,874,924.00	26.97%	24.65%
TOTAL							13,978,008,774.00			1,892,184,671.00		1,943,738,005.00		2,209,341,404.00				4,101,526,075.00	37.14	27.26%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Uluan

Kinerja satuan perangkat daerah dapat diukur dengan berbagai indikator tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan pelimpahan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Toba satu-satunya urusan wajib yang diserahkan adalah dengan diterapkannya pelayanan administrasi terpadu satu pintu di daerah, Pemerintah dan Masyarakat selaku stake holder.

Disamping itu, ada satu kegiatan yaitu Pemeliharaan lampu jalan umum yang merupakan urusan wajib yang ditanggunggjawapi oleh Kecamatan yang selebihnya adalah urusan pilihan yang sifatnya rutin untuk memberdayakan Kecamatan dalam melakukan tugas pembinaan dan koordinasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati No.90 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir dimana susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari :

- a. **Kecamatan** dipimpin oleh Camat
- b. **Sekretariat** dipimpin oleh Sekretaris yang terdiri dari dua sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
- c. **Seksi** yang dipimpin oleh Kepala Seksi yaitu
 1. Seksi Tata Pemerintahan
 2. Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum
 3. Seksi Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati N0. 90 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kecamatan Uluan senantiasa berbenah diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berupaya agar keberadaan SKPD ini dapat bermanfaat bagi masyarakat melalui pengkoordinasian dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan dan

Kabupaten dalam memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan melalui kegiatannya. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur terutama aparatur desa agar semakin lebih profesional dan tanggap akan kebutuhan masyarakat. Melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Uluan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan dengan kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Titik tolak Kinerja yang jelas dengan adanya SPM Kecamatan Uluan
- Perjanjian/penandatanganan fakta Integritas antara Bupati Toba Samosir dengan Camat dalam pelaksanaan target kinerja
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Tersedianya sarana dan prasarana
- Adanya stake holder, beberapa perusahaan di Kecamatan Uluan

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Sarana dan prasarana desa yang belum memadai khususnya Sarana dan Prasarana Kantor Desa yang masih minim
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan

Eksternal

Peluang :

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat,

dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan publik

- Adanya sumber-sumber potensial dari pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu termasuk para perantau dalam upaya marsipature hutanabe
- Keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa terjaga
- Sumber daya manusia yang cukup
- Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
- Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa

Tantangan :

- Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan dan seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Adanya dana pembangunan dan pemberdayaan di desa dari Pemerintah Pusat menuntut Kecamatan untuk semakin bijak melakukan koordinasi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas
- Latar belakang pendidikan PNS di Lingkungan Desa masih belum memadai dan perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Desa dan Kecamatan;

Sehubungan dengan tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Kerja Kantor Camat Uluan dibidang Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, maka analisa keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.30. berikut :

Tabel 2.2 (Tabel TC.30)
Analisa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Uluwu

[illegible]

	Persentase Desa dan Kelurahan	-	-	100%	100%	100%	100%	37,5%	50%	100%	100%	100%	
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	-	-	100%	100%	100%	100%	64.2%	64,11%	100%	100%	100%	Presentase capaian tidak sesuai target karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan di Kecamatan karena keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan fasilitasi pelayanan

3	IKP (Indikator Kinerja Program)												
	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan belum mencapai target karena pemanfaatan inovasi birokrasi dan Teknologi informasi dalam pelayanan belum maksimal
	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Pemberdaan Masyarakat desa dan kelurahan belum mencapai target karena masih kurangnya partisipasi keterlibatan semua lapisan dalam Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan
	Persentase desa/kelurahan tertib administrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase desa tertib administrasi Pemerintahan Desa			100%	100%	100%	100%	37.50%	50%	100%	100%	100%	Tertib administrasi Pemerintahan Desa belum mencapai target karena Masih kurangnya kompetensi dan SDM aparatur desa
	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	64.20%	64,11%	100%	100%	100%	Kinerja penunjang urusan pemerintah daerah belum mencapai target karena : - Kompetensi dan SDM Aparatur belum memadai - Keterbatasan anggaran dalam peningkatan fasilitas pelayanan publik

Tabel 2.3

Layanan Administrasi Pemerintahan Umum di Kecamatan Uluhan

No	Jenis Layanan Administrasi Umum	Sub Kegiatan	PIC
1	Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai ketentuan peraturan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
2	Memfasilitasi penyelesaian masalah /sengketa yang terjadi di desa	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
3	Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP, KK, serta surat keterangan pindah, dll	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Tata Pemerintahan
4	Memfasilitasi dan meneliti pemberkasan SKHM, ahli waris, IMB	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Tata Pemerintahan
5	Membuat laporan data kependudukan di wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Tata Pemerintahan
6	Memfasilitasi pelayanan ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelumsos
7	Membuat pengantar ijin usaha dagang	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelumsos
8	Melaksanakan pengawasan dan penyaluran Bantuan PKH, BPNT dan Sembako	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelumsos
9	Memonitoring data penerima bantuan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelumsos
10	Memonitoring Pelaksanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kasi PMD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Uluan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Uluan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan sejauh ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai banyak keberhasilan dan komitmen untuk memperbaiki kinerja maupun pelayanan publik antara lain agar setiap urusan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien seperti pelayanan kependudukan, proses perizinan dan terfasilitasinya proses pembangunan, terbinanya kelompok masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kedudukan hak dan kewajibannya.

Tentu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban banyak permasalahan dan hambatan yang ditemui sehingga mempengaruhi capaian kinerja Kecamatan antara lain rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Desa, minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan desa seperti fasilitas kantor yang sangat mendesak, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana desa, berkurangnya animo masyarakat akan wawasan kebangsaan maupun berkurangnya tradisi budaya gotong royong dan rendahnya rasa peduli/memiliki di tingkat masyarakat.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program; Tantangan ke depan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Uluan antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah terhadap hukum dan peraturan, sikap masyarakat yang apatis dan kurang peduli akan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, dan relatif sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat pengangguran khususnya generasi muda.

Sementara peluang yang didapat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain banyaknya anak rantau asal Uluan yang telah berhasil untuk dapat diajak berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, belum tergalinya sepenuhnya potensi-potensi Kecamatan seperti prospektif pembukaan lahan-lahan tidur, potensi pariwisata, perikanan danau dan pengembangan industri rumah tangga.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, diharapkan untuk mempercepat proses pembangunan di Kecamatan Uluan disarankan agar perencanaan program kedepan dapat memprioritaskan penguatan lembaga Desa, peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa seperti pengadaan Kantor Desa, penataan dan penguatan fungsi Desa, dan peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Disamping itu program dan kegiatan agar lebih memprioritaskan penataan pasar yang perlu mendapat penanganan serius yang sekarang telah menjadi tugas pokok Kecamatan dan jatah APBD yang lebih memprioritaskan kelangsungan hidup masyarakat seperti penguatan lembaga Koperasi, bantuan modal, bibit tanaman/ternak dan penyuluhan-penyuluhan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan Uluan

Sebelum penyusunan finalisasi RENJA Kecamatan Uluan, banyak proses yang dilaksanakan sehingga Rancangan Akhir RENJA dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi skala Prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka RENJA Kecamatan Uluan Tahun 2026 ini merupakan perbaikan berupa finalisasi setelah menerima masukan dari stake Holder, Masyarakat dan hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD Kabupaten Toba.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.4 (tabel T- C.31) berikut :**Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelahaan usulan program dan kegiatan prioritas, sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam daftar prioritas Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Tahun 2026. Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam Renstra RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026. Hasil kesepakatan Desk di Musrenbang Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dituangkan dalam Tabel 2.5 (Tabel TC. 31) berikut:

Tabel 2. 4 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENJA TAHUN 2026
KABUPATEN TOBA

SKPD : KECAMATAN ULUAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Uluan	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,295,524,000	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Uluan	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,295,524,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Uluan	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	6,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Uluan	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	6,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Uluan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	3,000,000	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Uluan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	3,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Uluan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	3,000,000	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Uluan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	3,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Uluan	Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	2,046,452,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Uluan	Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	2,046,452,000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Uluan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	2,046,452,000	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Uluan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	2,046,452,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Uluan	Cakupan layanan administrasi umum	100%	84,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Uluan	Cakupan layanan administrasi umum	100%	84,000,000	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Uluan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	7,000,000	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Uluan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	7,000,000	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Uluan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5,000,000	2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Uluan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5,000,000	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Uluan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	2,000,000	3 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Uluan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	2,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Uluan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Laporan	70,000,000	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Uluan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Laporan	70,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Uluan	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100%	36,800,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Uluan	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100%	36,800,000	
1	Pengadaan Mebel	Kec. Uluan	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket	1,500,000	1 Pengadaan Mebel	Kec. Uluan	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket	1,500,000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Uluan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	5 paket	35,300,000	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Uluan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	5 paket	35,300,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Uluan	Jasa penunjang kinerja aparatur	100%	67,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Uluan	Jasa penunjang kinerja aparatur	100%	67,000,000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Uluan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	7,000,000	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Uluan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	7,000,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Uluan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	60,000,000	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Uluan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	60,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Kec. Uluan	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	55,272,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kec. Uluan	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	55,272,000	
1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Uluan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	49,272,000	1 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Uluan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	49,272,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Uluan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	4,000,000	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Uluan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	4,000,000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Uluan	Jumlah Rehabilitas Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	2,000,000	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Uluan	Jumlah Rehabilitas Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	2,000,000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Uluan	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	25,000,000	II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Uluan	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	25,000,000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di		Kec. Uluan	Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	5 kegiatan	23,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kec. Uluan	Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	5 kegiatan	23,000,000	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Uluan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	23,000,000	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Uluan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	23,000,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		Kec. Uluan	Persentase kesesuaian layanan dengan SOP	100	2,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	Kec. Uluan	Persentase kesesuaian layanan dengan SOP	100	2,000,000	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Uluan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	2	1,000,000	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Uluan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	2	1,000,000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Uluan	Jumlah Laporan Pelakanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2	1,000,000	2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Uluan	Jumlah Laporan Pelakanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2	1,000,000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Uluan	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	21,000,000	III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Uluan	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	21,000,000	
Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		Kec. Uluan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	6 kegiatan	17,000,000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Uluan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	6 kegiatan	17,000,000	
1	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Uluan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	17 Desa	17,000,000	1 Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Uluan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	17 Desa	17,000,000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kec. Uluan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		4,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Uluan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		4,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Uluan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	4,000,000	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Uluan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	4,000,000	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Uluan	Tingkat penanganan Trantibum	100%	6,000,000	IV PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Uluan	Tingkat penanganan Trantibum	100%	6,000,000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah		Kec. Uluan	Tingkat koordinasi penyelenggaraan trantibum	100%	6,000,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Uluan	Tingkat koordinasi penyelenggaraan trantibum	100%	6,000,000	
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Uluan	Jumlah Laporan koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1%	6,000,000	1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Uluan	Jumlah Laporan koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1%	6,000,000	
IV	PROGRAM PEMYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Uluan	Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Umum	100%	43,200,000	IV PROGRAM PEMYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Uluan	Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Umum	100%	43,200,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Uluan	Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	12 kegiatan	43,200,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Uluan	Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	12 kegiatan	43,200,000	
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. uluan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 orang	10,000,000	1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. uluan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 orang	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kec. Uluan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	14,000,000	2 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kec. Uluan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	14,000,000	
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Uluan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	19,200,000	3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Uluan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	19,200,000	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Uluan	Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100%	20,000,000	VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Uluan	Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100%	20,000,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kec. Uluan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	12 desa	20,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kec. Uluan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	12 desa	20,000,000	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Uluan	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	17 Desa	20,000,000	1 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Uluan	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	17 Desa	20,000,000	
Jumlah					2,410,724,000	Jumlah					2,410,724,000

langsung renja = 2026

analisis = 2026

2.5 Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelahaan usulan program dan kegiatan prioritas, sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam daftar prioritas Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Tahun 2026. Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam Renstra RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026. Hasil kesepakatan Desk di Musrenbang Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dituangkan dalam Tabel 2.5

Tabel 2.5 (Tabel TC. 32)					
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025					
Kabupaten Toba					
Perangkat Daerah : Kecamatan Uluan					
NO	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN ULUAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan skala prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada serta kendala-kendala yang bisa terjadi dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart fungsi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan yang digariskan dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Uluan untuk masa 1 (satu) tahun ke depan dalam periode 2025 - 2030 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka optimalnya pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/ Kelurahan, peningkatan kualitas hidup perempuan pedesaan, pengolahan data yang up to date, pembinaan generasi muda, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, pengelolaan Pasar dan kebersihan, perbantuan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan, melakukan evaluasi dan verifikasi maupun kewenangan lain yang dilimpahkan pihak atasan.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN ULUAN

Bertitik tolak pada Visi dan Misi yang diemban, maka Kecamatan Uluan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TUJUAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2025
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayan pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	100 %

Sasaran

No	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2025
1	Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Peningkatan tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	100 %
		Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Publik	100 %
		Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %
		Persentase Layanan administrasi Pemerintahan Umum	100 %
		Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100 %
		Persentasi Layanan Administrasi yang tertangani	100 %

3.2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Uluan, maka disusun program kerja Kecamatan Uluan dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, memperhatikan SOP, SPM dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas.

Program dan Kegiatan Kecamatan Uluan tahun 2026 terdiri dari 6 Program dan 12 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Administasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4 Pengadaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait
 - 2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
 - a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan/wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel Rencana Program dan Kegiatan/Perumusan Program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 2.6 (tabel TC-33) yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 (T.C. 33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN TOBA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027																																									
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif																																								
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																																																	
7	01				KECAMATAN																																																	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Perangkat Daerah					%		100%	2,410,724,000										2,645,152,000																										
7	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase capaian kinerja perangkat daerah					%		100%	2,295,524,000					DAU										100%					2,460,152,000																
7	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase capaian kinerja perangkat daerah					%		100%	6,000,000					DAU										100%					8,000,000																
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					dokumen	Kec. Uluan	4	3,000,000					DAU										10					4,000,000															
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					laporan	Kec. Uluan	22	3,000,000					DAU										10					4,000,000															
7	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Cakupan layanan administrasi keuangan					%		100%	2,046,452,000					DAU										100%					2,072,349,000																
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Orang/ bulan	Kec. Uluan	19	2,046,452,000					DAU										17					2,072,349,000															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Cakupan layanan administrasi umum	%		100%	84,000,000	DAU		100%	117,038,000
7 01 01 2 07 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	Kec. Uluan	3	7,000,000	DAU		20	20,000,000
7 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	Kec. Uluan	2	5,000,000	DAU		8	12,038,000
7 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	Kec. Uluan	1	2,000,000	DAU		3	5,000,000
7 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	Kec. Uluan	2	70,000,000	DAU		700	80,000,000
7 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%		100%	36,800,000	DAU		100%	97,000,000
7 01 01 2 07 06	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	Kec. Uluan	0	0	DAU		1	27,000,000
7 01 01 2 07 06	Pengadaan Mebel					Jumlah paket Mebel yang disediakan	Paket	Kec. Uluan	5	1,500,000	DAU		5	25,000,000
7 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Kec. Uluan	5	35,300,000	DAU		5	33,000,000
7 01 01 2 07 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bbangunan Lainnya					Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	unit	Kec. Uluan	0	0	DAU		5	12,000,000
7 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Jasa penunjang kinerja aparatur	%		100%	67,000,000	DAU		100%	68,000,000
7 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air, dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Laporan	Kec. Uluan	3	7,000,000	DAU		3	8,000,000
7 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	Kec. Uluan	2	60,000,000	DAU		2	60,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Barang milik daerah yang terpelihara</i>	%		100%	55,272,000	DAU		100%	97,765,000
7 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	unit	Kec. Uluan	4	49,272,000	DAU		4	49,765,000
7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Kec. Uluan	20	4,000,000	DAU		20	18,000,000
7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Kec. Uluan	3	2,000,000	DAU		3	30,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	persen		100%	25,000,000	DAU		100%	44,000,000
7 01 02 2 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Kegiatan pemerintahan di kecamatan</i>	kegiatan		100	23,000,000	DAU		100	40,000,000
7 01 02 2 01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	Kec. Uluan	3	23,000,000	DAU		3	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 02 2 01 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					Persentase kesesuaian layanan dengan SOP	dokumen	Kec. Uluan	100	2,000,000	DAU		100	4,000,000
7 01 02 2 01 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	dokumen	Kec. Uluan	2	1,000,000	DAU		2	2,000,000
7 01 02 2 01 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan					Jumlah laporan Pelaksanaan Non perizinan pada urusan Pemerintahan	dokumen	Kec. Uluan	2	1,000,000	DAU		2	2,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	persen		100%	21,000,000	DAU		100%	35,000,000
7 01 03 2 01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yg dilakukan	persen		100%	17,000,000	DAU		100%	25,000,000
7 01 03 2 01 01	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Desa	Kec. Uluan	17	17,000,000	DAU		17	25,000,000
7 01 03 2 01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100		100%	4,000,000	DAU		6	10,000,000
7 01 03 2 01 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	Kec. Uluan	3	4,000,000	DAU		5	10,000,000
7 01 05	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Tingkat Penanganan gangguan Trantibum	persen		100%	6,000,000	DAU		100%	19,000,000
7 01 05 2 01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Tingkat Koordinasi penyelenggaraan trantibum	persen		100%	6,000,000	DAU		12	19,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 05 2 01 08	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/sinegi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Kec. Uluan	1	6,000,000	DAU		1	19,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa tertib administrasi pemerintahan umum	persen		100%	43,200,000	DAU		100%	57,000,000
7 01 05 2 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	persen		100%	43,200,000	DAU		100%	57,000,000
7 01 05 2 01 08	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bnineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketanhan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bnineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	Kec. Uluan	500	10,000,000	DAU		1	16,000,000
7 01 05 2 01 08	Pembinaan Kerukunan Antar Suku san Inta Suku, Umat Beragama, ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas Kemanaan Lokal, Regional dan Nasional	orang	Kec. Uluan	500	14,000,000	DAU		1	20,000,000
7 01 05 2 01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	Kec. Uluan	1	19,200,000	DAU		1	21,000,000
7 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	%		100%	20,000,000	DAU		100%	30,000,000
7 01 06 2 01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	desa		17	20,000,000	DAU		desa	30,000,000
7 01 06 2 01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	Kec. Uluan	17	20,000,000	DAU		12	30,000,000
JUMLAH						2,410,724,000	JUMLAH		2,645,152,000	

BAB V

PENUTUP

RENJA Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif PD sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026. Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian- penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Uluan, 2025



**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN ULUAN KAB. TOBA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN ULUAN						2.410.724.000,00							2.606.152.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.410.724.000,00							2.606.152.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.410.724.000,00							2.606.152.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.295.524.000,00						-	2.421.152.000,00	
		[Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	100	100	100	100	2.295.524.000,00	-	-	-	-	-	-	2.421.152.000,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat	-	8.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		4.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
		-	-	-	-	-	-	2.295.524.000,00	-	-	-	-	-	-	2.421.152.000,00	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				22 Laporan	3.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	Masyarakat		4.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
		[Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP Penurunan intensitas emisi GRK	100 75	100 65.25	100 69.36	100 71	2.295.524.000,00	-	-	-	-	-	-	2.421.152.000,00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.046.452.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	ASN	-	2.072.349.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				19 Orang/bulan	2.046.452.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	ASN		2.072.349.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	84.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	ASN	-	117.038.000,00	KECAMATAN ULUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN		20.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN		12.038.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN		5.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	70.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN		80.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	36.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN	-	58.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	1.500.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN		25.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	35.300.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN		33.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	67.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN	-	68.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	7.000.000,00	Kab. Toba, Uluhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN		8.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	ASN		60.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.272.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	ASN	-	97.765.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	49.272.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	ASN		49.765.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	4.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	ASN		18.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	ASN		30.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	25.000.000,00						-	44.000.000,00	
		[Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH]	Kesesuaian layanan dengan SOP	100	0	0 100	100	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	44.000.000,00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	23.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	Masyarakat	-	40.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	23.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		40.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	2.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat	-	4.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		2.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat	-	10.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	6.000.000,00						-	19.000.000,00	
		[Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan]	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan	100	0	100	100	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	19.000.000,00	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat	-	19.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		19.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	43.200.000,00						-	57.000.000,00	
		[Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan]	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	0	100	100	43.200.000,00	-	-	-	-	-	-	57.000.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	43.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat	-	57.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	10.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		16.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	14.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	19.200.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		21.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
		[Meningkatnya pembinaan desa]	Tingkat Pembinaan Desa	100	0	0 100	100	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat	-	30.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				17 Laporan	20.000.000,00	Kab. Toba, Uluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	JUMLAH							2.410.724.000,00							2.606.152.000,00	